

Pada akhirnya diharapkan adanya Taman Hutan Raya Model yang menjadi contoh terhadap pembangunan konservasi hayati dengan skala provinsi di Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan serta berazaskan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

## **ASPEK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA**

Oleh :

**Hariadi Kartodihardjo**

---

**Workshop Penyusunan Konsep Management Plan Taman Hutan Raya  
Bogor, 9 Mei 2007**

# KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN TAHURA

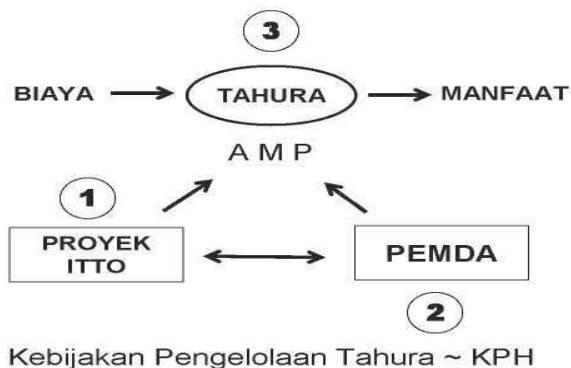
HARIADI KARTODIHARDJO  
2007

Bahan presentasi dalam Workshop "Penyusunan Konsep  
Management Plan TAHURA", 9 Mei 2007, di Fahutan IPB

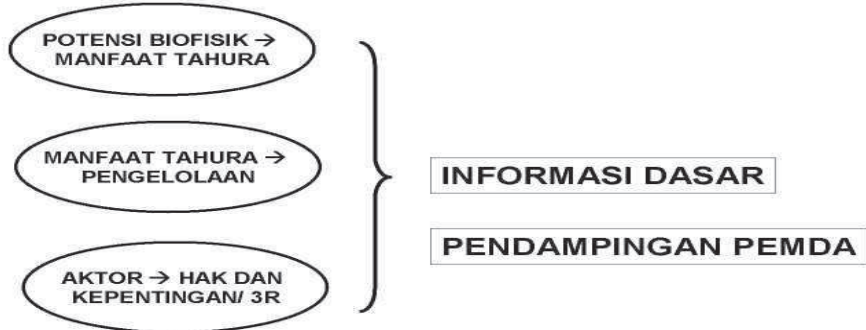
## PERTANYAAN POKOK

1. Design kelembagaan agar proyek ITTO menjadi awal penyusunan rencana pengelolaan secara adaptif (AMP)?
2. Design kelembagaan yg memungkinkan Pemda ikut menyusun AMP? Design kelembagaan agar Tahura memberi manfaat bukan cost center?
3. Design kelembagaan agar AMP dilaksanakan?

## LINGKUP KAJIAN



# 1 Proyek ITTO → AMP



# 2 Peran Aktif PEMDA

## PENJABARAN UU:

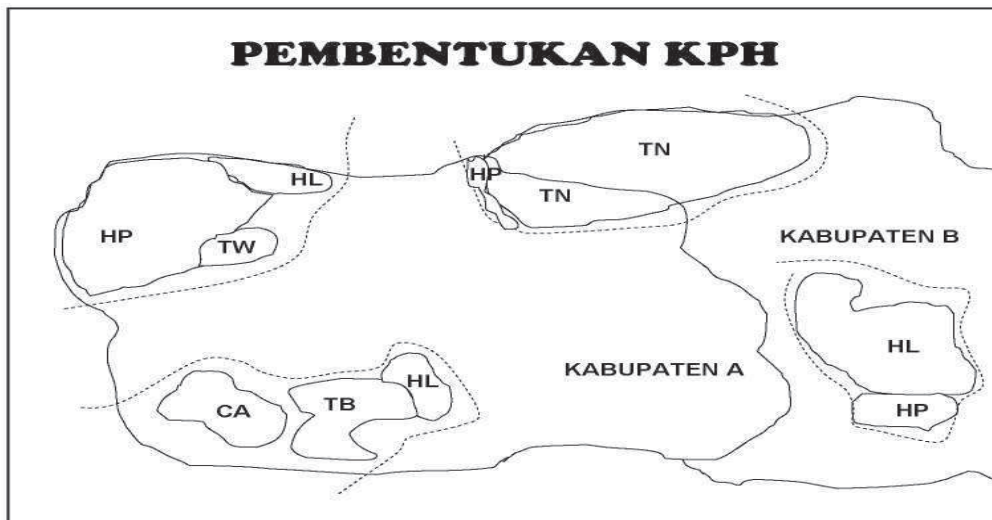
### PENGURUSAN HUTAN

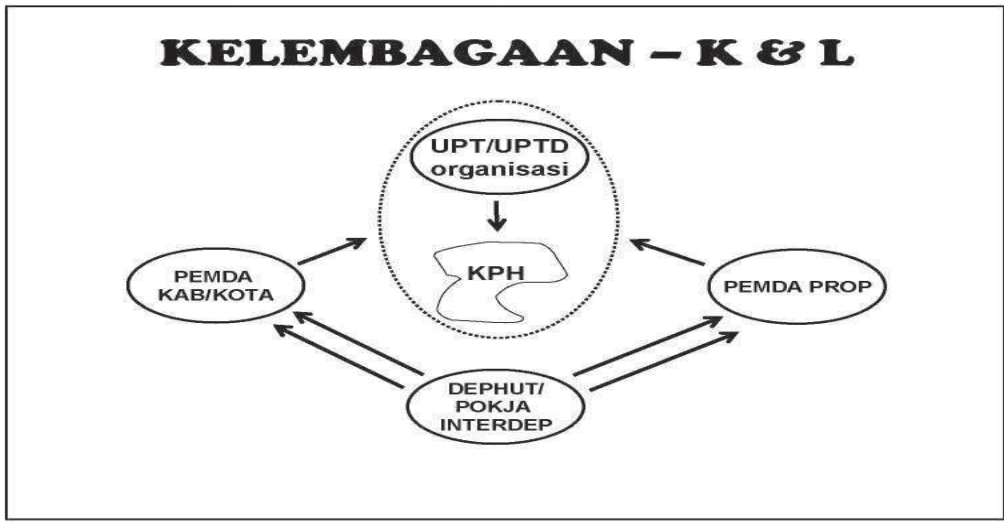
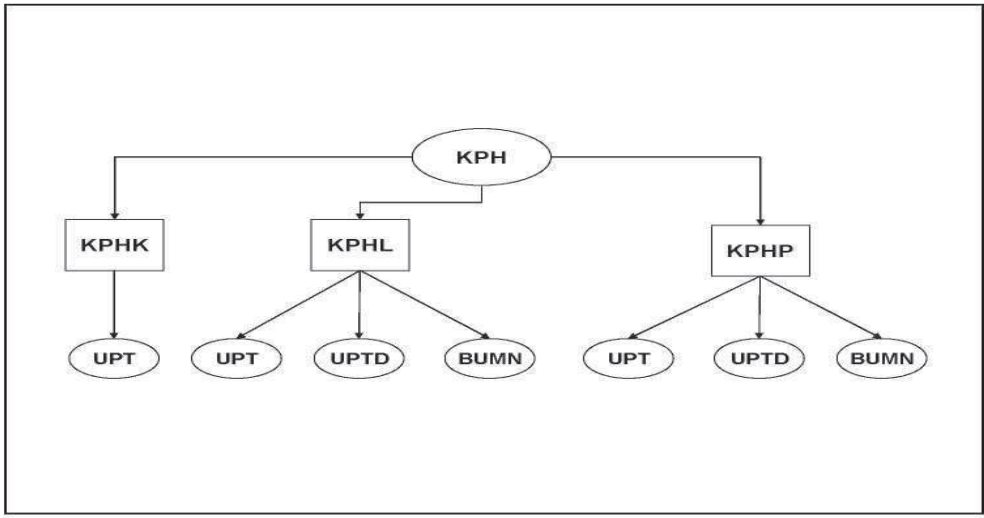
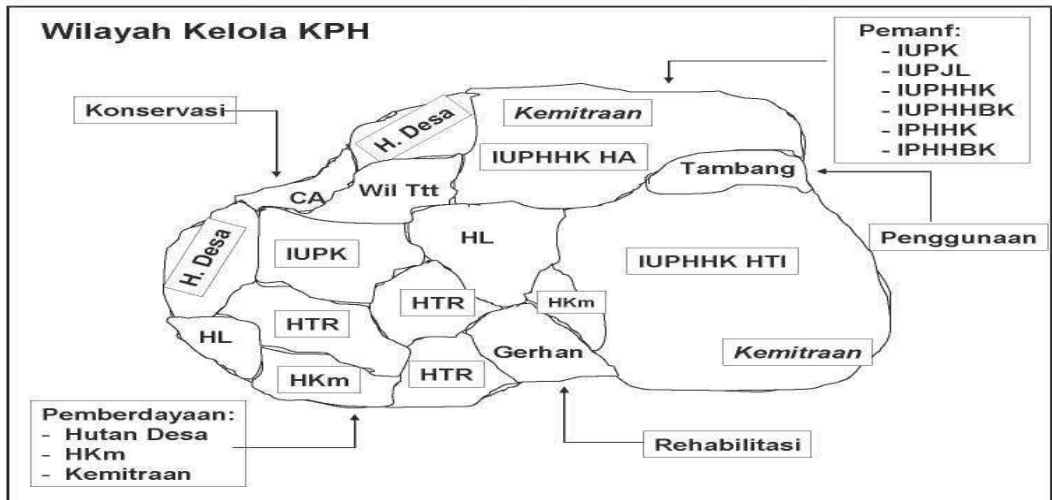
- PERENCANAAN
- PENGELOLAAN
- LITBANG
- PENGAWASAN

- inventarisasi hutan,
- pengukuhan kawasan hutan,
- penatagunaan kawasan hutan,
- pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- penyusunan rencana kehutanan

- tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- rehabilitasi dan reklamasi hutan,
- perlindungan hutan dan konservasi alam

## PEMBENTUKAN KPH





# 59 URUSAN PEMERINTAHAN

## BAPLAN 11

- Inventarisasi hutan
- Pengukuhan kawasan
- Penunjukkan kawasan
- Penataan batas
- Penetapan kawasan
- Hutan dng tujuan khusus
- Penatagunaan kws hutan
- Pembentukan wilayah
- Penataan batas luar usaha HP
- Rencana Kehutanan
- Sistem Info Kehutanan

## BPK 10

1. Rencana KPHP 20 th
2. Rencana KPHP 5 th
3. Rencana KPHP 1 th
4. Rencana KU 20 th - HP
5. Rencana KU 5 th - HP
6. Rencana KU 1 th - HP
7. Pemanfaatan HH - HP
8. Pemungutan HH - HP
9. Industri Pengolahan HH
10. Penataan Usahaan HH

## Setjen 6

1. PNPB
2. Litbang Kehutanan
3. Diklat Kehutanan
4. Penyuluhan Kehutanan
5. Bina & kendali bidang kehutanan
6. Pengawasan bidang kehutanan

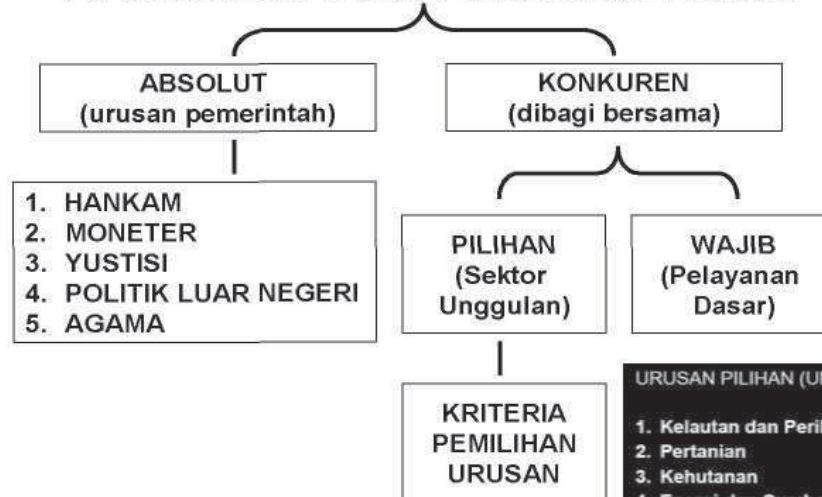
## RLPS 9

1. Perencanaan RHL
2. Pengelolaan DAS
3. Pelaksanaan RHL
4. Reklamasi kws hutan
5. Reklamasi hutan areal bencana
6. Pemberdayaan masy
7. Pengembangan hutan Hak
8. Hutan Kota
9. Perbenihan T Hutan

## PHKA 23

1. Rencana KPHL 20 th
2. Rencana KPHL 5 th
3. Rencana KPHL 1 th
4. Rencana KU 20 th - HL
5. Rencana KU 5 th - HL
6. Rencana KU 1 th - HL
7. Penataan areal kerja usaha HL
8. Rencana KPHK 20 th
9. Rencana KPHK 5 th
10. Rencana KPHK 1 th
11. Rencana P 20 th - KK
12. Rencana P 5 th - KK
13. Rencana P 1 th - KK
14. Penataan Blok KK
15. Pengelolaan THR
16. Pemanfaatan K & Jasling - HP
17. Pemanfaatan K & Jasling - HL
18. Pengusahaan pariwisata
19. Pengelolaan KSA, KPA, TB
20. Pengawetan tumbuhan dan satwa liar
21. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
22. Lembaga Konservasi
23. Perlindungan Hutan

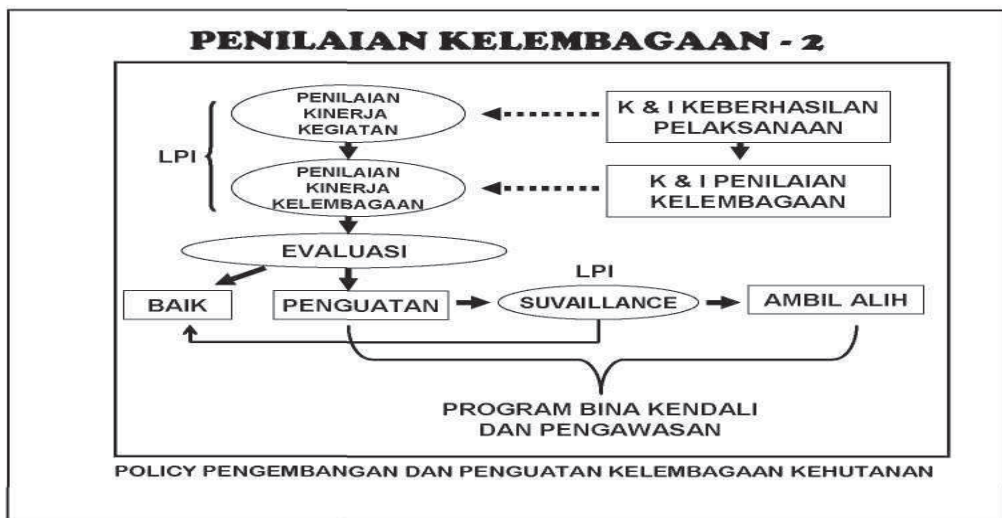
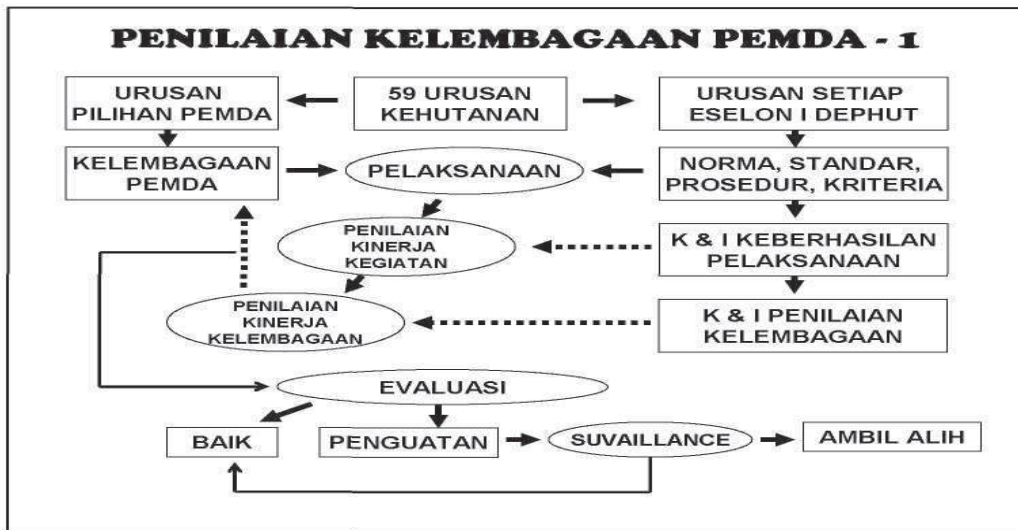
# URUSAN PEMERINTAHAN



- URUSAN PILIHAN (UNGGULAN) :**
1. Kelautan dan Perikanan
  2. Pertanian
  3. Kehutanan
  4. Energi dan Sumberdaya Mineral
  5. Pariwisata
  6. Industri
  7. Perdagangan
  8. Transmigrasi.

Sumber: Draft Revisi PP25/2000

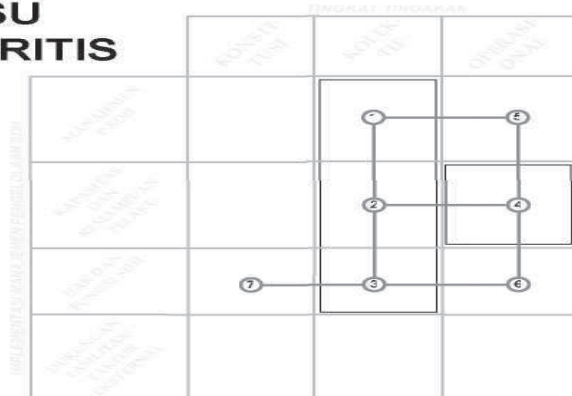




**3**

### MENGGISI RUANG KELOLA: KASUS BARITO SELATAN - KONFLIK

#### ISU KRITIS



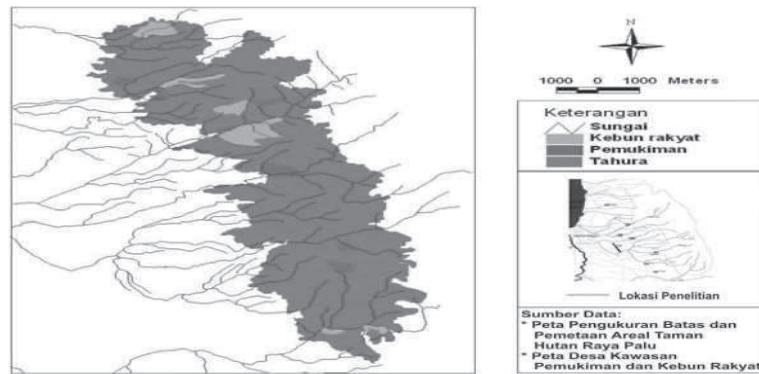
- PENINGKATAN KAPASITAS MASY: (1). MANAJEMEN PSDA, (2). ORGANISASI, (3). PEMETAAN WILAYAH
- OPERASIONAL YAYASAN DAN OR (4)
- USULAN PROGRAM – INVESTASI UNTUK PENGUATAN MANAJEMEN (5)
- TATA BATAS DAN TATA RUANG DESA (6)
- PENGESAHAN OLEH PEMDA (7)

## KESIMPULAN

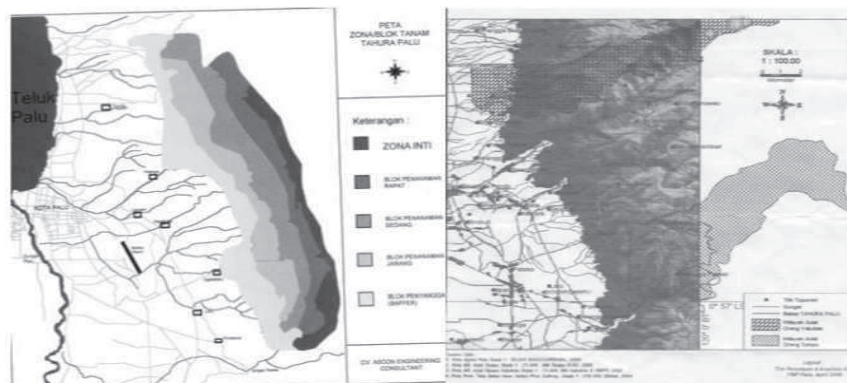
- KELEMBAGAAN ~ ANALITICAL DIMENSION DAN BEHAVIORAL DIMENSION
- ANALITICAL DIMENSION ~ PERATURAN DAN ORGANISASI
- BEHAVIORAL DIMENSION ~ DEPHI ~ SHARE LEARNING ~ PELEMBAGAAN

# ANALISIS KEBIJAKAN AKSES MASYARAKAT KAILI KE DALAM TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SUL-TENG

JAMLIS LAHANDU, 2007



Gambar Peta Tahura Dan Penyebaran Pemukiman Penduduk Dalam Kawasan.



Gambar Peta Pembagian Zona Dan Akses Masyarakat Adat Dalam Kawasan Tahura Sulteng



## Karakteristik Wilayah Penelitian

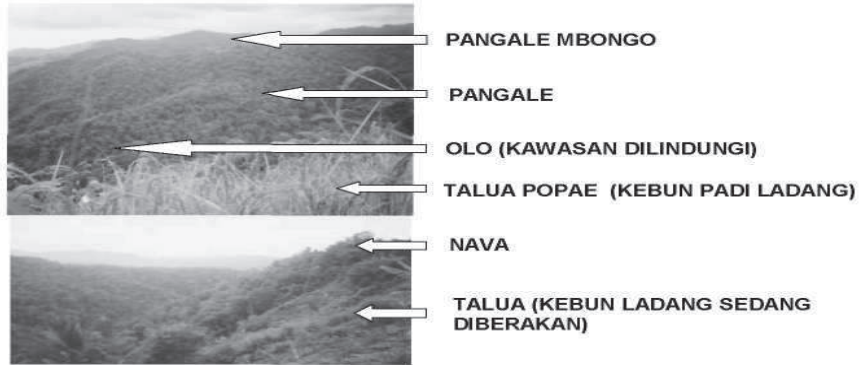
**Tabel 1. Karakteristik wilayah penelitian/kawasan pemukiman di TAHURA**

Karakteristik	Komunitas Masyarakat/Kawasan Pemukiman						
	Vintu	Vatutela	Bunti Pobau	DAS Pondo	Uentumbu	Tompu	Tana Lando
Topografi, Letak pemukiman pdk.	Berbukit, kaki gunung	Berbukit, DAS Vatutela	Berbukit, & lereng gng.	Datar, DAS Pondo	Bukit, DAS Mamara	Puncak G. Bulilli	Puncak G. Paneki
Ketinggian dpl (m)	300	310	600	280	250	700-1150	1140
Dialek	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Ledo	Kaili Ledo
Akses atas sumberdaya	Lahan, hsl hutan, penggem balaan	Lahan galian c, penggem balaan	Lahan tan. bawang	Lahan, tan. keras galian A, C, peng gembalaan	Hasil hutan, penggem balaan	Lahan, ladang, hasil hutan.	Lahan, ladang, hsl hutan, aren,
Penguasaan lahan scr. de fakto (ha)	82,14	64,00	56	207,00	92,88	107,9	46,80
Penguasaan lahan rata-rata/KK (ha)	1,11	0,80	0,74	2,30	1,08	1,30	1,17

**Lanjutan Tabel 1. .**

Karakteristik	Komunitas Masyarakat/Kawasan Pemukiman						
	Vintu	Vatutela	Bunti Pobau	DAS Pondo	Uentumbu	Tompu	Tana Lando
Lahan komunal	-	30 ha	-	-	-	-	-
Ornop dominan	LSM	LSM	-	LSM	-	LSM	LSM
Organisasi pemerintah	-	-	-	-	Lurah	-	-
Jumlah penduduk (KK/ jiwa)	74/447	80/317	76/228	90/470	86/357	83/430	40/167
Infrastruktur jalan	Jalan aspal	Jalan aspal	Jalan tanah	Jalan aspal	Jalan setapak	Jalan setapak	Jalan setapak
Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Vintu	DAS Vatutela	-	DAS Pondo, Poboya	DAS Kavatu na	-	DAS Paneki
Debet Air DAS (m <sup>3</sup> /detik)	kering	kering	-	0,15	0,70	-	1,10

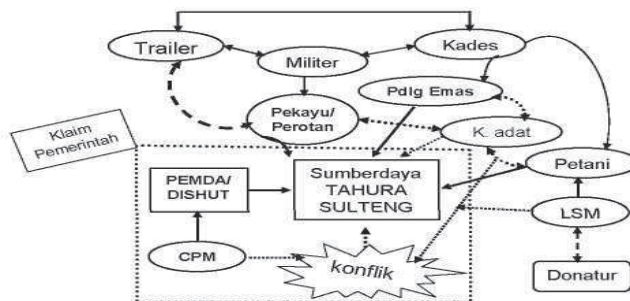
**LANSEKAP HUTAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT *KAILI LEDO & TARA***



**LANSEKAP HUTAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT *KAILI LEDO & TARA***



**Peta akses stakeholders dalam pengelolaan TAHURA Sul-Teng**



*Keterangan :*

- ←-→ Relasi bisnis (antar stakeholder dan atau donatur).
- Interaksi kapital mutualistis.
- ⋯ Akses Institusi Adat atas komunitasnya terhadap sumberdaya alam.
- Aliran akses atas sumberdaya
- ⋯ Pemicu & mediasi.
- ⋯ Klaim kawasan oleh pemerintah

**Tabel 2. Mekanisme akses pengelolaan sumberdaya alam TAHURA SULTENG**

Mekanisme	Stakeholders
Pengguna ( <i>gain</i> )	PT. Cita Palu Mineral, Petani, Perotan, Pendulang emas, Pengumpul batu kali, pedagang hasil hutan, institusi adat.
Pengendali akses ( <i>control acces</i> )	Dinas Kehutanan, Institusi Adat Komunitas Lokal Kaili.
Pemelihara akses ( <i>maintain akses</i> )	Dinas Kehutanan, Petani, Perotan, LSM, Institusi Adat.

**Tabel 3. Ringkasan Right, Responsibility Dan Revenues Dari 14 Stakeholders**

Stakeholders	Right	Nilai	Responsibility	Nilai	Revenues	Nilai
Petani Subsisten	Akses thdp lahan, partisipasi dalam keputusan	2	Merencanakan tata guna lahan dan registrasi	1	Menjual, konsumsi hasil tani	5
Pendulang emas	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Menjual hasil pendulangan	2
Pengumpul batu kali	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Menjual hasil tambangan	2
Petani Bawang	Akses terhadap lahan, partisipasi dalam keputusan	2	Merencanakan tata guna lahan, register	1	Menjual hasil usahatani	5
Kelompok Rotan	Akses terhadap hasil hutan non kayu	3	Menanam bibit rotan dalam hutan	3	Menjual hasil hutan non kayu	5
Dinas Kehutanan	Supervisi, pengelolaan	4	Kontrol tebang, menarik pajak, koordinasi	2	Penerimaan dari hasil hutan dan fee	3,5
Pimpinan DPRD	Akses terhadap masyarakat lokal ttg penerapan perda	2	Kontrol terhadap pelaksanaan perda	1	Penerimaan PAD dari intansi teknis	2

**Lanjutan Tabel 3.....**

Stakeholders	Right	Nilai	Responsibility	Nilai	Revenues	Nilai
PT.C. P. M.	HGU penuh	3	Mengelola tambang emas dengan baik	0	Belum ada	0
Pedagang Rotan	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Menerima rotan dari masyarakat lokal	3
LSM	Tidak ada	0	Memfasilitasi/mendampingi masy. lokal (adat)	5	Menerima jasa dari dampingan	2
RT/Kadus/ Kades	Akses terhadap semua sumberdaya	3	Menjaga dan mengawasi kawasan, wilayahnya	2	Fee, upah, hadiah	1
Babinsa	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Fee, upah, hadiah	1
Distamen	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Fee dari perizinan tambang	2
PPL	Akses terhadap informasi	2	Menyampaikan penyuluhan, informasi ke masyarakat	1	Upah/gaji dari kerja penyuluhan..	2

*Keterangan : Hasil pengolahan data primer (2006) ; 1= sangat kurang, 2= kurang, 3= cukup/sedang, 4=tinggi, 5= sangat tinggi (maksimum)*

**Tabel 4. Perbandingan Antar Stakeholder Dari Aspek Hak, Tanggung Jawab Dan Manfaat (Penerimaan).**

Stakeholder Yang Paling Tinggi :		
Hak	Tanggung Jawab	Manfaat
1. Dinas Kehutanan	1. LSM.	1. Petani subsisten/ petani bawang/ Kelompok rotan.
2. PT.Citra Palu Minerals/Kades/Kadus/ Ka.RT	2. Kelompok Rotan	2. Dinas Kehutanan
3. Petani subsisten/Petani bawang/PPL	3. Dinas Kehutanan/Kades/ Kadus/ Ka. RT.	3. Pedagang rotan
	4. Petani subsisten/ Petani bawang/ Pimpinan DPRD/ PPL	4. Pendulang emas, Pimpinan DPRD/ LSM/Dinas Pertambangan, pengumpul batu kali, PPL.

*Keterangan : Hasil pengolahan data primer (2006)*

**Tabel 5. Ringkasan Relationship/Hubungan antar stakeholder di TAHURA SULTENG**

Stakeholder	Perambang Emas	Perambang Batu Kali	Petani Bawang	Kelompok rotan	Kepala Dinas Kehutanan	DPD Propinsi	PT. Citra Palu Minerals	Pedagang Rotan LSM	Kades/Kabuh/Ketua RT	Babinsa	Disperanan	PPL
Petani subeisten	B	B	B	B	K	-	-	-	B	B	-	-
Pendulang emas	///	B	B	-	K	-	Br	-	B	B	B	K
Pengumpul batu kali	///	///	-	-	-	-	Br	-	B	B	B	K
Petani bawang	-	-	///	B	K	-	-	-	B	-	-	S
Kelompok rotan	-	-	-	///	K	-	-	B	K	B	B	-
Dinas Kehutanan	-	-	-	///	B	B	B	K	K	K	B	B
Pimp DPRD	-	-	-	-	-	///	S	-	-	S	-	B
PT C P M	-	-	-	-	-	-	///	Br	Br	S	B	-
Pedagang Rotan	-	-	-	-	-	-	-	///	B	B	B	-
LSM	-	-	-	-	-	-	-	///	B	-	K	K
RT/Kades/Kades	-	-	-	-	-	-	-	-	///	B	Br	S
Babinsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	///	B	B
Distamen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	///	-
PPL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	///

**Keterangan**

- Kualitas relasi : Baik (B), Sedang (S), Kurang (K), Buruk (Br), Tidak ada interaksi (-).
- Baik (B) : Ada interaksi personal/institusi, sinergis berkelanjutan min 3 kali kontak/3 bln.
- Sedang (S) : Ada interaksi, sinergis, tidak berkelanjutan, maksimal 3 kali kontak/3 bln.
- Kurang (K) : Ada interaksi, kurang sinergis, berpolemik, sekali kontak, tidak berkelanjutan.
- Buruk (Br) : Ada interaksi, tidak sinergis, konfliktual.
- (-) : Tidak ada interaksi sama sekali

**Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) SULTENG.**

